

# MANAJEMEN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi di Inspektorat Kabupaten Mojokerto)

---

 Oleh: SIGIT WIDHIANTO ( 04230071 )

Government Science

Dibuat: 2010-03-31 , dengan 3 file(s).

**Keywords:** MANAJEMEN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

## ABSTRAKSI

Kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan kesempatan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Pengawasan membutuhkan pemahaman yang mendalam bagi para aparat pengawas Inspektorat Daerah yang tentunya ada langkah-langkah atau prosedur pemeriksaan yang harus dijalankan sebagaimana mestinya sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan belum atau telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat semakin kompleksnya tugas dan beban Inspektorat Daerah ke depan, maka tanggungjawab dan kinerja seluruh aparat pengawasan dituntut lebih maksimal lagi. Kondisi ini mengharuskan seorang aparat pengawas dapat meningkatkan akan mengambil langkah penyesuaian dalam pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota, meskipun implementasinya baru akan diterapkan secara efektif pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2010 nanti.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan untuk mengetahui kesiapan aparatur Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam melakukan manajemen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu dengan cara analisis yang menggambarkan keadaan obyek berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan penelitian dan tidak menggunakan data statistik. Dengan kata lain penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang karakteristik dari obyek yang diteliti atau menggambarkan suatu fenomena. Adapun alasan penggunaan metode penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam menjelaskan dan menjabarkan mengenai obyek yang diteliti.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Inspektorat merupakan lembaga pengawasan yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 3 Tahun 2002 dan Keputusan Bupati Mojokerto No. 12 Tahun 2008, dimana fungsinya adalah melaksanakan pengawasan yang meliputi kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan ketertiban masyarakat. Pelaksanaan pemeriksaan kebenaran laporan yang dilakukan oleh Inspektorat ini dimaksudkan untuk mencocokkan dan memeriksa kembali laporan-laporan yang ada, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau belum dengan 3 bidang yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam melaksanakan pemeriksaan kebenaran laporan tersebut Inspektorat mempunyai dua (2) tahap dalam pemeriksaan yaitu menguji kebenaran laporan dan meninjau kembali kebenaran laporan.

Hasil dan capaian yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah SKPD 20

pemeriksaan, Bappeda 10, Dispenda 35, Kecamatan 15, Dinas pendidikan 15, UPTD 10, Bos SD 50, Bos SMP 15, Bos SMA 5, Puskesmas 23, RSUD Sukandar 10 pemeriksaan. Dan dari seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah pada Dispenda terdapat 1 kasus administratif dan telah diselesaikan sedangkan pada pemeriksaan pada dana BOS di sekolah dasar terdapat 5 kasus kesalahan administrasi dan telah diselesaikan. Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan pembangunan non fisik ini menunjukkan hasil yang meningkat. Hal ini terbukti dengan terwujudnya Badan, Dinas, Kantor, Bagian sebagai sasaran evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto sesuai dengan yang diprogramkan.

## ABSTRAC

Broader authority to local governments to regulate and manage his own household is an opportunity that should be used by communities to participate in development activities. Supervision requires a deep understanding of the supervisory authorities of the Regional Inspectorate of course there are steps or procedures that must be run properly so it can concluded that the implementation of government affairs, or have not been going according to the laws and regulations in force.

Terjemahan Bahasa Indonesia ke Inggris Tunjukkan huruf latin

See more complex tasks and the Regional Inspectorate weight forward, then the entire responsibility and performance monitoring officials again demanded to be maximal. This condition requires a supervisory authorities can improve would take a step adjustment in the hearing penyelenggaraan good local governance at the provincial level or at the Regency / City, even though the new implementation will be applied effectively in Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) in 2010.

Research objectives to be achieved in this study was to determine management of government oversight based on the principles of good governance in Mojokerto regency Inspectorate and to determine the readiness of the apparatus Mojokerto District Inspectorate in conducting oversight of government management based on the principles of good governance.

This research is a descriptive study of the analysis by describing the state of the object based on data collected from field research and not using statistical data. In other words that are descriptive study aims to accurately menggambarkan about the characteristics of the object under study or describe a phenomenon. The reason for using this research method is to make it easier to explain and describe the objects under study.

As is well known that the Inspectorate is the supervisory agency that helps the Regent in holding some areas of government affairs in accordance with Regulation No. Mojokerto District. 3 of 2002 and Decree No. Mojokerto Regent. 12 of 2008, where its function is to carry out supervision activities include training and supervision of local governance, development, and public order. Implementation of examination of the truth of a report conducted by the Inspectorate is intended to match and check the reports, whether already implemented in accordance with the provisions of the applicable or not with 3 fields of audit, inspection and examination performance with a particular purpose. In carrying out the truth of the report examine the Inspectorate has two (2) stage in the examination of reports and test the truth of the reports reviewed.

Results and achievements have been made Mojokerto District Inspectorate is SKPD 20

examination, Bappeda 10, 35 Revenue, District 15, Office of Education 15, UPTD 10, Bos 50 elementary, 15 junior high school boss, boss SMA 5, 23 health centers, hospitals Sukandar 10 examination. And examination of all activities undertaken by the Inspectorate District Revenue Mojokerto there is the administrative and 1 case was settled while on inspection of the BOS funds in primary schools there are 5 cases of administrative error and has resolved.

Can be taken a conclusion that the efforts made by the Inspectorate Mojokerto district in non-physical development shows increasing returns. This was proven by the establishment of Agency, Office, Office, Section for target evaluation of the Regional Government Inspectorate carried out by Mojokerto regency programmed in accordance.